



## Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi

Novi Dianita Sari, Nurvita Diah Rahayu, Binti Saniatu Salimah, Nur Muhammad Hima Firmansah, Novi Khoiriawati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No. 46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur 66221

Korespondensi penulis: [novidianita97@gmail.com](mailto:novidianita97@gmail.com)

**Abstract.** Poverty is a complex and ongoing social problem that requires an integrated and sustainable approach. The problem of poverty impacts various aspects of people's lives, so it is important to overcome the problem of poverty. The aim of this research is to describe public policy strategies in overcoming poverty. The research approach used is a qualitative approach with the data used in the form of secondary data sourced from documents, Central Statistics Agency (BPS), research journals, articles and relevant sources. The data analysis technique is inductive based on the data obtained, then analyzed in relation to public policy strategies in overcoming poverty. The results of this research show that public policy strategies have been successful and effective in reducing poverty levels through the leadership policies of Joko Widodo and Jusuf Kalla including the Prosperous Family Savings Program (SKS), the Smart Indonesia Program (PIP), the Healthy Indonesia Program, then during Joko's leadership period Widodo and Ma'ruf Amin with the Direct Cash Assistance (BLT) program.

**Keywords:** Poverty, Public Policy, Programs

**Abstrak.** Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Masalah kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan strategi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari dokumen, Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal penelitian, artikel, dan sumber-sumber yang relevan. Teknik analisis data bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis terkait dengan strategi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan publik telah berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui beberapa program pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat (KIS), selanjutnya pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan adanya program Kartu Pra-kerja dan KIP Kuliah.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Kebijakan Publik, Program.

### LATAR BELAKANG

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran. Allah Swt Menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:

أَوْسَعِينَ ذَا مَثْرَبَةٍ

yang artinya: "...atau orang miskin yang sangat membutuhkan" (QS al-Balad [90]: 16)

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab "al-faqr", berarti membutuhkan (alihtiyaaaj). Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif karena merupakan tantangan sosial yang rumit. Menurut (Fitriana & Qibthiyah, 2021) untuk mencegah kemiskinan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian, perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya saat ini. Menjamin kesejahteraan masyarakat secara

umum sangat bergantung pada penerapan langkah-langkah kebijakan publik yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak atau kurang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, dan perumahan untuk mencapai kehidupan yang layak. Jika kemiskinan dibiarkan, dampaknya akan memengaruhi berbagai aspek, seperti rendahnya pendapatan, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, serta buruknya kondisi lingkungan. Kemiskinan juga sering ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan keterbelakangan. Pada umumnya, masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam kemampuan berusaha dan akses terhadap kegiatan ekonomi, sehingga mereka tertinggal jauh dibandingkan dengan masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi (Prasetyo, 2020). Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang tidak memadai dimana barang dan jasa yang layak sulit diperoleh (Pasaribu et al., 2022).

Berikut ini data persentase (%) kemiskinan di Indonesia dalam periode 2019 - 2023:



Sumber : BPS, data diolah peneliti, 2024.

**Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2023**

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah diolah peneliti, Indonesia pada lima tahun akhir mengalami peningkatan dan penurunan tingkat kemiskinan yaitu pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 7,22%, tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik menjadi 7,42%, tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 7,40%, tahun 2022 jumlah penduduk miskin 7,18% dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin 7%. Dapat terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir

yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 jumlah kemiskinan yang terjadi di Indonesia turun dari tahun ke tahun yaitu dari 7,40% menjadi 7,18% dan 7%.

Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki berbagai program yang dilakukan guna mengatasi kemiskinan. Beberapa programnya yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam dua periode sangat berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada kebijakan berupa program-program dari pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kemiskinan**

Terdapat lima dimensi menonjol dalam definisi kemiskinan. Pertama, kemiskinan terdiri dari banyak dimensi yang saling terkait. Kemiskinan tidak selalu dikaitkan dengan kurangnya suatu hal, namun kemiskinan selalu dikaitkan dengan rasa lapar atau kekurangan makanan. Kedua, kemiskinan memiliki dimensi penting psikologis, seperti ketidakberdayaan, tidak dapat memberikan pendapat, ketergantungan, rasa malu, dan kerendahan hati. Adanya norma sosial akan solidaritas di masyarakat dapat membantu orang miskin untuk terus percaya pada sisi kemanusiaan mereka sendiri. Ketiga, orang miskin kekurangan akses ke infrastruktur dasar seperti jalan raya (terutama di pedesaan wilayah), transportasi, dan air bersih. Keempat, orang miskin sadar bahwa pendidikan menawarkan jalan keluar dari kemiskinan, namun hal tersebut dapat terjadi hanya jika lingkungan ekonomi mendukung. Kelima, kesehatan yang buruk merupakan sumber kemelaratan yang selalu dikaitkan dengan orang miskin. Hal ini berkaitan dengan biaya perawatan kesehatan yang tinggi sehingga orang miskin dapat kehilangan pekerjaan karena sakit (Fitriana & Qibthiyah, 2021). Suatu masyarakat juga disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Taufik, 2021).

### **Kebijakan Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1988), Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Kebijakan publik

sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik adalah serangkaian fase kerja pejabat publik (kebijakan publik sebagai proses manajemen). Artinya, penekanan atau fokus efisiensinya ada pada ranah legislasi (pelaku kebijakan) (Papilaya, 2020).

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik adalah proses menerapkan tindakan yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama. Pertama, komunikasi adalah kunci keberhasilan implementasi, kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pelaksana dan kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaan. Kedua, sumber daya sangat penting meskipun kebijakan dikomunikasikan dengan baik, tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan dana yang memadai, implementasi tidak akan efektif. Ketiga, disposisi pelaksana, yang mencakup karakteristik seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pelaksana dengan disposisi yang baik akan menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan, sementara perbedaan sikap dapat menghambat implementasi. Keempat, struktur birokrasi, organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan; struktur yang efisien mendukung pelaksanaan yang efektif, sementara struktur yang tidak efisien dapat menghambat proses tersebut (Zubaedah et al., 2023).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif adalah kekuatannya bukan pada data dan analisis statistik, namun pada deskripsi. Data yang digunakan berupa data. Sumber data yang digunakan ialah sumber sekunder yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013) serta bersumber dari Badan Pusat statistik (BPS), jurnal penelitian, artikel dan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Program Kebijakan

Terdapat beberapa program kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo dalam dua periode:

#### 1. Periode Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019)

##### a) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin (KM) di Indonesia. Program ini pertama kali diberlakukan pada tahun 2007 dan berada di bawah tanggungjawab Kementerian Sosial. Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH memberikan bantuan sosial yang terdiri dari tiga komponen: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan diberikan kepada penerima manfaat program PKH yang memiliki ibu hamil dengan maksimal 2 kali kehamilan dan keluarga yang memiliki anak usia dini (0 s/d 6 tahun) dengan jumlah maksimal 2 anak. Komponen pendidikan diberikan kepada penerima manfaat program PKH yang memiliki anak SD/MI dan sederajat atau SMP/MTs dan sederajat atau SMA/MA dan sederajat berusia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesejahteraan sosial diberikan kepada penerima manfaat program PKH yang memiliki maksimal 1 orang lansia dan keluarga yang memiliki maksimal 1 orang penyandang disabilitas fisik dan mental tingkat berat (Rizal & Purnairawan, 2024).

##### b) BPNT/Kartu Sembako

Kartu Sembako, yang dahulu dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), adalah sebuah program bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2020, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diubah menjadi Program Sembako. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako tidak hanya dibelanjakan beras dan telur, tetapi juga untuk sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur, atau buah yang dapat dibeli di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal ini memberikan alat baru bagi pemerintah untuk mengurangi dampak sosial

ekonomi Covid-19 pada tingkat rumah tangga. Dengan memperluas kepesertaan Program Sembako, pemerintah berupaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan yang seimbang. Untuk meningkatkan peran program, beberapa perbaikan diperlukan, yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan BPNT yang dimulai sejak 2017 (Kemenkeu, 2020).

c) Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan miskin dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. Tujuan utama PIP adalah untuk memastikan bahwa anak-anak ini tetap dapat menerima pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (SD hingga SMA/SMK/MA) atau jalur non-formal (paket A hingga C dan pendidikan khusus). Dengan demikian, pemerintah berupaya mencegah anak-anak dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, PIP juga bertujuan untuk mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh siswa, baik biaya langsung (seperti biaya baju sekolah dan alat tulis) maupun tidak langsung (seperti biaya transportasi dan makanan). Dengan demikian, PIP diharapkan dapat membantu siswa dalam mengurangi beban biaya pendidikan dan memfokuskan diri pada proses belajar (Kemendikbud, 2020).

d) Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, sejak Januari 2014, program jaminan kesehatan dikenal dengan istilah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Tujuan program ini adalah untuk memastikan akses kesehatan yang komprehensif kepada seluruh warga negara agar mereka dapat memiliki kesehatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Program ini berjalan dengan mekanisme asuransi sosial melalui iuran yang dibayarkan oleh peserta. Untuk masyarakat miskin atau yang tidak dapat membayar iuran, pemerintah menjaminkan iurannya melalui dana bantuan sosial yang dikenal sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Program ini sebelumnya dikenal dengan Jamkesmas. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Jokowi, program tersebut diperluas dengan Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat

(KIS). Dalam proses bantuan, tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat, tetapi bantuan yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Rizal & Riski, 2024).

## 2. Periode Joko Widodo - Ma'ruf Amin (2019-2024)

### 1. Kartu Pra-Kerja

Program Kartu Prakerja yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia memiliki tujuan utama untuk membantu pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan, serta membantu pekerja/buruh dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas di pasar kerja. Dalam seleksi, program Kartu Prakerja melakukan sinkronisasi data dengan beberapa institusi, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT ASABRI, dan PT Taspen, serta data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan tinggi. Tujuan dari sinkronisasi ini adalah untuk memastikan status kebjkerjaan dan upah peserta, serta memverifikasi informasi pendidikan mereka (Septiyadi, M. R., & Rahayu, 2022).

### 2. KIP Kuliah

Pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterapkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus untuk mahasiswa atau Perguruan Tinggi adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan untuk siswa/i lulusan SMA, SMK, dan sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi secara gratis. Pada dasarnya KIP-Kuliah berbeda dengan beasiswa lainnya. KIP-Kuliah, yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi sedangkan beasiswa pada umumnya merupakan pemberian penghargaan atau dukungan dana terhadap mereka yang berprestasi. KIP-Kuliah mulai diperkenalkan pada tahun 2020, sebagai pengganti beasiswa yang sebelumnya bernama Bidikmisi. KIP-Kuliah memberikan peluang bagi lebih banyak mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (Liliyana., 2022).

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan**

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian program kebijakan pengentasan kemiskinan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pada periode Jokowi-Jusuf Kalla:

### **1. Faktor Pendukung**

#### **a) Komitmen dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan besar-besaran infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan meningkatkan konektivitas dan membuka peluang ekonomi baru

#### **b) Pemberdayaan Daerah**

Otonomi daerah memberikan lebih banyak kendali kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan sesuai kebutuhan lokal

#### **c) Pelatihan Vokasi**

Peningkatan investasi dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja

### **2. Faktor Penghambat**

#### **a) Distribusi Infrastruktur Tidak Merata**

Fokus utama pada pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa dan beberapa daerah strategis lainnya meninggalkan beberapa daerah terpencil dan kurang berkembang

#### **b) Proses Birokrasi yang Kompleks**

Pelaksanaan program sering terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit dan lambat, mengurangi efisiensi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan

#### **c) Korupsi**

Korupsi di tingkat lokal dan nasional mengurangi alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk program pengentasan kemiskinan

#### **d) Kerentanan terhadap Bencana Alam**

Indonesia sering menghadapi bencana alam yang menyebabkan kemiskinan musiman dan kemiskinan akibat bencana (Kemenkeu, 2023).

Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pada periode Jokowi-Ma'ruf Amin:

1. Faktor Pendukung

a) Fokus Infrastruktur

Melanjutkan dan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, serta memperluas proyek baru untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing

b) Digitalisasi Layanan Pemerintah

Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah

c) Investasi Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah menginvestasikan lebih banyak dalam pelatihan vokasional dan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja (Kemenkeu, 2023).

2. Faktor Penghambat

a) Pandemi Covid-19

Pandemi memberikan pukulan berat pada perekonomian, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta menghambat beberapa proyek pembangunan

b) Ketidakpastian Regulasi dan Hukum

Kebijakan yang berubah-ubah dan kurangnya kepastian hukum dapat menghambat keberlanjutan program ekonomi

c) Keterbatasan Komunikasi

Komunikasi kebijakan yang kurang efektif dapat menghambat dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

d) Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya sumber daya dapat menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia, salah satunya termasuk keterbatasan sumber daya.

e) Keterbatasan Pengawasan

Kurang efektifnya pengawasan dapat menjadi penghambat dalam implementasi

kebijakan. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menghadapi beberapa kritik terkait dengan kebijakan yang dianggap tidak memenuhi janji-janji mereka, seperti dalam hal penguatan demokrasi, anti-korupsi, dan pemenuhan HAM.

f) Lemahnya Oposisi

Dalam masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, oposisi telah mengalami kelemahan dalam menghadapi kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan dianggap tidak sesuai (Thea Ady, 2021).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan adanya kebijakan publik sangat berkaitan dengan adanya strategi pengentasan kemiskinan. Melalui beberapa program yang dilakukan tiap periode kepemimpinan Joko Widodo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila. Beberapa program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Pra-Kerja, dan KIP Kuliah. Pada data BPS menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023 yang menandakan bahwa pemberian program yang dilakukan pemerintah telah berhasil. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengkaji lebih dalam dengan menganalisis kebijakan, program-program, dan faktor-faktor implementasi dengan lebih rinci pada masa orde lama hingga saat ini, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih optimal dan berbeda dengan penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- BPS (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Dalam: <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>, diakses tanggal 18 Mei 2024.
- Darmansyah. (2021). "Analisis pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)". *Jurnal SAGO: Gizi dan Kesehatan*, 3(1), 85-94.
- Fitriana, N. E., & Qibthiyyah, R. M. (2021). "Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 19-44. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v8i1.21120>

- Hakim, D., & Simangunsong, F. (2021). "Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan". *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2576, 85–92. <https://doi.org/10.32669/village>
- Indriani, K. (2023). "Implementasi Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kepada Siswa SMP Di Kabupaten Bantul". *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12(1), 61–74. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/18118>
- Kemendikbud, (2020). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam: [https://pip.kemdikbud.go.id/home\\_v1](https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1), diakses tanggal 22 Mei 2024.
- Kemenkeu, (2020). Indeks Manfaat Program Sembako. Dalam: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kaltim/id/datapublikasi/pub/pengumuman/2916-indeks-manfaat-program-sembako.html>, diakses tanggal 22 Mei 2024.
- Liliyana., U. N. H. (2022). Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) – Kuliah Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 74–84. <https://www.jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1567/1036>
- Marta Nia, I. (2022). "Hambatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas: Literature Review". Promotif: *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v12i1.2393>
- Noor, M., & Saleh, M. H. (2021). "Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 9-15.
- Papilaya, Josef. (2020). "Kebijakan Publik dalam Pengentasan kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 04(01), 77–91.
- Pasaribu, S., Akbar, A. J., & Desmawan, D. (2022). "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 155–162.
- Prasetyo, N. (2020). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kediri". *Risk: Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 56–71. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>
- Pujosiswanto, K. H., Palutturi, S., & Ishak, H. (2020). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 3(1). <https://doi.org/10.30597/jkmm.v3i1.10300>
- Rachmahnia, L. (2024). "Strategi Implementasi Program Smart Indonesia: Strategi Pelaksanaan Kebijakan Program Smart Indonesia". *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1347>

- Rizal, A. D., & Riski, P. (2024). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements* E-ISSN, 1(1), 3032–3401. <https://journals.akademia.or.id/index.php/jsm/index>
- Sandrawati, Rini. dkk. (2022). "Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19", *SCRIPTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. (2022). Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(2), 7.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, M. (2021). *Quo Vadis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Studi Tentang Hukum dan Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Tanah Air Beta. [http://repository.upstegal.ac.id/4271/1/%5BFull%5D\\_Taufik\\_Moh\\_Quo\\_vadis\\_kebijakan.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4271/1/%5BFull%5D_Taufik_Moh_Quo_vadis_kebijakan.pdf)
- Thea, Ady. (2021). Sejumlah Catatan Negatif 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-negatif-2-tahun-pemerintahan-jokowi-maruf-lt617626e036c7a/>, diakses tanggal 22 Mei 2024.
- Yulianto, T. (2023). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara. Dalam: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.
- Zubaedah, I., & Astuti, N. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Melalui Bantuan Tunai Langsung (BLT) dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 157-171.